

Produk Domestik Regional Bruto *Menurut Penggunaan*

PROVINSI
SULAWESI SELATAN

Tahun 2013

PDRB Menurut Penggunaan/Pengeluaran

Merupakan jumlah seluruh **pengeluaran** yang dilakukan oleh seluruh **institusi** pada suatu wilayah **selama satu tahun**.

Dalam publikasi ini dijelaskan bagaimana produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi digunakan untuk **konsumsi rumah tangga**, **konsumsi lembaga swasta nirlaba**, **konsumsi pemerintah**, **pembentukan modal tetap bruto**, **perubahan stok**, dan **ekspor neto**.

Penghitungannya disajikan dalam dua versi penilaian yaitu **atas dasar harga berlaku** dan **atas dasar harga konstan tahun 2000**. Komponen PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku memberikan gambaran tentang **agregat permintaan** pada tahun tersebut, sedangkan berdasarkan harga konstan mencerminkan **riil** pada tahun tertentu.

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGGUNAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013**

Katalog BPS : 9302004.73

Nomor Publikasi : 73552.1301

Ukuran Buku : 21,6 cm x 27,9 cm

Jumlah Halaman : 41 Halaman

**Naskah/Editor : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Provinsi Sulawesi Selatan**

**Gambaran Kulit : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Provinsi Sulawesi Selatan**

**Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan**

Dicetak Oleh :

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

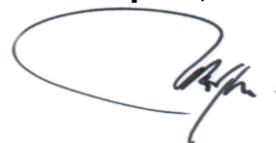
Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan 2013, merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya. Dalam publikasi ini dijelaskan bagaimana produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi digunakan untuk konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto.

Buku ini terdiri dari dua bab; bab pertama memuat konsep dan definisi serta metode penghitungan untuk memperoleh angka PDRB. Bab kedua, memuat uraian singkat tentang besarnya peranan dan pertumbuhan masing-masing komponen PDRB menurut penggunaan Tahun 2011-2013.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih dan bagi pengguna data, kami senantiasa terbuka menerima saran serta kritik untuk perbaikan publikasi selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Maret 2014

**Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan,
Kepala,**



NURSAM SALAM, S.E.
NIP. 19580711 197903 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. KONSEP DEFENISI DAN METODE PENGHITUNGAN	
1.1 KONSEP DEFINISI	3
1.1.1 PDRB Menurut Penggunaan	3
1.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4
1.1.3 Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba	5
1.1.4 Pengeluaran Pemerintah	6
1.1.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto	7
1.1.6 Perubahan Inventori	8
1.1.7 Ekspor dan Impor	8
1.2. METODE PENGHITUNGAN	9
1.2.1 PDRB menurut Penggunaan	9
1.2.2 Konsumsi Rumah tangga	10
1.2.3 Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba	12
1.2.4 Konsumsi Pemerintah	13
1.2.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto	14
1.2.6 Perubahan Inventori	15
1.2.7 Ekspor dan Impor	15
BAB II. ULASAN SINGKAT	
2.1 PDRB Menurut Penggunaan	16
2.2 Konsumsi Rumah tangga	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	24
2.5 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	26

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Tabel	Hal
Lampiran 1.1	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (dalam Juta Rupiah), Berdasarkan Harga Berlaku.	21
Lampiran 1.2	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (dalam Juta Rupiah), Berdasarkan Harga Konstan 2000.	22
Lampiran 2.1	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (dalam Persentase), Berdasarkan Harga Berlaku.	23
Lampiran 2.2	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (dalam Persentase), Berdasarkan Harga Konstan 2000.	24
Lampiran 3.1	Indeks Berantai PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (dalam Persentase), Berdasarkan Harga Berlaku.	25
Lampiran 3.2	Indeks Berantai PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (dalam Persentase), Berdasarkan Harga Konstan 2000.	26
Lampiran 4	Indeks Implisit PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (dalam Persentase)	27
Lampiran 5	Angka Inflasi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Penggunaan Tahun 2009-2013 (dalam Persentase)	28

DAFTAR GRAFIK

No. Grafik	Judul Grafik	Hal
Grafik 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan (persen), 2011-2013	20
Grafik 2.2	Perbandingan <i>Share</i> , Pertumbuhan dan Perkembangan Komponen Konsumsi Pemerintah di Sulawesi Selatan (persen), 2011-2013	22
Grafik 2.3	Perbandingan Pertumbuhan Investasi Fisik dan PDRB Sulawesi Selatan (persen), 2011-2013	26

<http://sulsel.bps.go.id>

BAB I

KONSEP DEFINISI DAN METODE PENGHITUNGAN

Produk domestik regional bruto (PDRB) menurut penggunaan merupakan hasil penghitungan kegiatan penggunaan ekonomi pada level provinsi sementara pada skala nasional dikenal dengan nama PDB Penggunaan/*expenditure*. PDRB penggunaan ini sebagian besar diturunkan dari data neraca produksi/sektoral. Penggolongan PDRB ini dilihat dari struktur keluaran 9 output. Pada sisi ini dapat ditelusuri lebih jauh penggunaan atas produk barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah tersebut. Dengan demikian seluruh transaksi dipastikan mempunyai keterkaitan dengan transaksi pada neraca lainnya.

Berikut beberapa konsep secara umum yang melatar belakangi penyusunan PDRB adalah :

1. Wilayah ekonomi, adalah wilayah geografi yang secara administrasi dikelola oleh suatu pemerintahan, dimana manusia, barang dan modal bebas berpindah.
2. Ekonomi domestik adalah kegiatan ekonomi yang terjadi dalam wilayah domestik suatu daerah, yang dibedakan dengan luar daerah.
3. Produk adalah output (keluaran) yang dihasilkan oleh suatu proses produksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi diwilayah domestik, pada suatu waktu tertentu.
4. Domestik adalah batasan teritorial kegiatan ekonomi yang hampir mendekati konsep wilayah teritorial suatu negara/daerah secara hukum.
5. PDRB adalah produk yang dihasilkan diwilayah ekonomi domestik yang dibedakan dengan PDRN karena ada unsur penyusutan.

Penghitungan atau pengukuran PDRB menurut lapangan usaha (nilai tambah sektoral/produksi) maupun PDRB menurut pengeluaran/penggunaan dilakukan dengan metode dan tatacara yang berbeda, meskipun keduanya mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. PDRB menurut penggunaan lebih menekankan pada bagaimana pendapatan masyarakat yang digunakan atau dikeluarkan untuk kepentingan konsumsi akhir. Konsumsi akhir produk barang dan jasa bisa berasal dari produk domestik bisa pula dari wilayah lain (termasuk impor).

Pada umumnya cara pengukuran PDRB menurut pengeluaran menggunakan metode arus komoditi, yaitu dengan cara menelusuri lokasi barang dan jasa yang tersedia yang menjadi konsumsi akhir masyarakat disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Barang dan jasa tersebut bisa berasal dari produk domestik maupun impor.

Penghitungan PDRB ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan produksi (*production approach*)

Menghitung pendapatan wilayah berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi dalam wilayah.

2) Pendekatan pendapatan (*income approach*)

Balas jasa faktor produksi yang menjelaskan struktur/komposisi pendapatan dalam suatu wilayah berupa upah gaji, surplus usaha, sewa tanah, dan bunga sebagai balas jasa modal.

3) Pendekatan penggunaan/pengeluaran (*expenditure approach*)

Menjelaskan bagaimana struktur penggunaan akhir dari PDRB yang diciptakan seluruh unit-unit produksi yang ada.

Selama ini pendekatan pertama dan ketiga umumnya telah dikembangkan, sedangkan pendekatan kedua belum pernah

dikembangkan. Dan jenis pendekatan yang ketiga inilah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penyusunan publikasi ini.

1.1. Konsep Definisi

1.1.1. PDRB Menurut Penggunaan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut penggunaan sering juga disebut PDRB menurut permintaan atau PDRB menurut pengeluaran. Dipandang dari sisi pengeluaran atau penggunaan, PDRB merupakan penjumlahan dari pengeluaran konsumsi akhir yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi makro seperti institusi rumah tangga, pemerintah, maupun pengusaha (produsen) serta luar negeri dalam suatu wilayah pada jangka waktu tertentu.

Kategori atau komponen penggunaan akhir yang transaksinya direalisasikan oleh pelaku-pelaku ekonomi tersebut meliputi pengeluaran untuk konsumsi akhir barang dan jasa, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), inventori (cadangan), serta ekspor barang dan jasa dalam batas domestik suatu wilayah. Pengeluaran akhir yang dimaksud disini adalah barang dan jasa tersebut tidak untuk tujuan diproses lebih lanjut menjadi produk lain, dalam wilayah tersebut (kecuali ekspor).

Berdasarkan model *Keynesian*, penghitungan PDRB dari sisi penggunaan ini lebih menjelaskan bagaimana pendapatan yang diciptakan melalui proses ekonomi dari berbagai macam sektor produksi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya. Hubungan tersebut dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = C + GFCF + \Delta Invent + X - M$$

dimana :

Y (*Income*) : PDRB

C (*Consumption*) : Konsumsi akhir

GFCF (*Gross Fixed Capital Formation*) : Pembentukan Modal Tetap Bruto

$\Delta Invent$: Perubahan Inventori
X	: Ekspor
M	: Impor

PDRB menurut penggunaan disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000. Penghitungan atas dasar harga berlaku adalah penghitungan terhadap seluruh komponen PDRB penggunaan yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada masing-masing tahun. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan adalah penghitungan terhadap seluruh komponen PDRB yang dinilai atas dasar harga pada satu tahun dasar tertentu (*base year*). Pada publikasi ini penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan tahun dasar 2000. Komponen PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku memberikan gambaran tentang besaran nominal PDRB karena dipengaruhi oleh perubahan volume maupun perubahan harga, sedangkan berdasarkan harga konstan menjelaskan besaran PDRB secara riil karena hanya dipengaruhi oleh perubahan volume saja (faktor perubahan harga dieliminasi).

1.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi akhir. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Pengeluaran ini mencakup pengeluaran baik dengan cara membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi atau diproses lebih lanjut menjadi produk baru, setelah dikurangi penjualan neto barang bekas pada periode waktu tertentu.

Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga antara lain dalam bentuk:

1. Makanan dan non makanan, baik dalam bentuk bahan mentah maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok;
2. Perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening listrik, telepon dan air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri.
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki dan penutup kepala;
4. Barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, perhiasan dan sebagainya;
5. Barang lain seperti bahan kebersihan, bahan kecantikan, obat-obatan, vitamin dan sebagainya
6. Jasa-jasa seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa perorangan dan sebagainya.

Alasan diperhitungkannya imputasi sewa rumah sebagai pengeluaran rumah tangga karena dalam hal ini rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa sewa rumah bagi diri sendiri. Imputasi sewa rumah milik sendiri adalah perkiraan nilai sewa atas dasar harga pasar meskipun status rumah tersebut adalah rumah milik sendiri. Apabila rumah tangga tersebut benar-benar menyewa rumah, maka yang diperhitungkan adalah nilai sewa yang sebenarnya dibayar, baik dibayar secara penuh maupun tidak misalnya karena mendapat subsidi.

1.1.3. Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba

Lembaga swasta yang tidak mencari untung (Nirlaba) adalah lembaga atau badan swasta yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat seperti organisasi serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi

politik, badan keagamaan, lembaga penelitian, pendidikan, kesehatan, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang khusus melayani masyarakat dan tidak mengutamakan keuntungan/nonkomersial. Yang dimaksud dengan nonkomersial adalah lembaga nirlaba yang menjual jasa layanannya pada tingkat dibawah harga pasar; yaitu harga yang tidak didasarkan atas biaya produksi, bahkan kadangkala layanan yang diberikan dengan cuma-cuma.

Pengeluaran lembaga swasta nirlaba meliputi semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penerimaan transfer, penyusutan dan pajak tak langsung neto dikurangi dengan penjualan barang bekas. Pada umumnya sumber pembiayaan dari lembaga ini berasal dari sumbangan dan bantuan perorangan, masyarakat, organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri dan pemerintah. Apabila bantuan dana dan pengawasan sepenuhnya atau sebagian besar dari pemerintah maka lembaga ini dimasukkan ke dalam konsumsi pemerintah.

1.1.4. Pengeluaran Pemerintah

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah sistem yang menjalankan dan mengatur kegiatan pemerintahan dalam menyediakan jasa pelayanan umum kepada masyarakat, seperti kegiatan administrasi pemerintahan, menjaga kestabilan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur ekonomi dan lain-lain.

Pemerintah sebagai konsumen akhir mencakup departemen, lembaga bukan departemen pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa. Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pertahanan. Pengeluaran ini berupa belanja pegawai, penyusutan barang modal, belanja barang dan jasa. Belanja barang disini termasuk biaya perjalanan dinas, pemeliharaan dan

pengeluaran lain yang bersifat rutin; artinya biaya-biaya yang dikeluarkan habis digunakan dalam proses produksi/pelayanan masyarakat.

Pengeluaran untuk belanja pegawai yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembayaran upah dan gaji dalam bentuk uang dan barang beserta tunjangannya, iuran jaminan sosial, dana pensiun, asuransi kecelakaan, tabungan hari tua dan sejenisnya

1.1.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, termasuk juga perbaikan besar barang modal yang menyebabkan bertambahnya umur pemakaian atau bertambahnya kapasitas produksi, dikurangi penjualan barang modal bekas.

Barang modal adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Oleh karena itu disebut sebagai barang modal tetap, sedangkan bruto mencerminkan bahwa penghitungan PMTB belum dikurangi penyusutan barang modal.

Pembentukan modal disini termasuk margin perdagangan dan biaya pengangkutan, biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli barang-barang modal. Termasuk juga dalam pembentukan modal tetap bruto adalah pengeluaran untuk meningkatkan pendayagunaan seperti pembukaan tanah untuk lahan pertanian dan perluasan areal pertambangan.

Pembentukan modal tetap bruto menggambarkan investasi domestik fisik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat perlengkapan angkutan dan lainnya.

1.1.6 Perubahan Inventori

Inventori (stok) adalah persediaan barang pada akhir tahun yang menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, diperoleh dari pembelian yang akan digunakan sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi ataupun untuk dijual kembali. Selain itu, termasuk juga barang-barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum terjual, barang tersebut baik berbentuk barang jadi maupun barang setengah jadi. Inventori termasuk sebagai bagian dari investasi karena inventori termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian dari investasi yang direncanakan. Perubahan inventori adalah jumlah persediaan barang pada akhir tahun dikurangi dengan jumlah persediaan barang pada awal tahun.

Data tentang inventori dari berbagai jenis barang masih sangat sulit diperoleh, sehingga komponen perubahan inventori dalam PDRB penggunaan masih merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dari hasil penjumlahan nilai tambah bruto PDRB sektoral dikurangi dengan komponen PDRB penggunaan lainnya. Sehingga nilai perubahan inventori tersebut masih terkandung selisih statistik.

1.1.7 Ekspor & Impor

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa penduduk antar Provinsi dan atau dengan penduduk negara lain. Yang dimaksud dengan ekspor dan impor disini batasan wilayahnya adalah antar Provinsi dan luar negeri. Transaksi antar Provinsi adalah transaksi barang dan jasa yang terjadi antar wilayah provinsi di Indonesia, sedangkan luar negeri adalah transaksi yang terjadi antar negara.

Ekspor barang dinilai menurut harga *Free on Board* (FOB) sedangkan impor menurut *Cost Insurance Freight* (CIF). Yang dimaksud dengan FOB adalah penyerahan barang antara eksportir dengan importir, dengan penetapan harga dihitung berdasarkan nilai barang ditambah

dengan semua biaya sampai barang berada di atas kapal. Biaya yang menjadi tanggungan pihak penjual terdiri atas bea pajak ekspor, biaya pengangkutan komoditas dari gudang penjual ke dermaga pelabuhan, biaya muat dari dermaga ke atas kapal serta biaya memadatkan atau menyusun komoditas. Sedangkan yang dimaksud dengan CIF adalah penyerahan barang diantara eksportir dengan importir, dimana harga jual sudah mencakup harga pokok barang yang bersangkutan serta ongkos transportasi. Artinya eksportir mengatur dan menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam pengiriman barang dari tempat pelaku ekspor ke tempat pelaku impor.

Penghitungan ekspor maupun impor nilainya diperoleh dalam satuan kurs dolar US, sehingga perlu dikonversi ke dalam satuan rupiah. Untuk konversi nilai ekspor digunakan rata-rata kurs beli US\$ bulanan, sedangkan impor digunakan rata-rata kurs jual US\$ bulanan.

1.2. METODE PENGHITUNGAN

1.2.1. PDRB menurut Penggunaan

Seperti telah dijelaskan terlebih dahulu, bahwa dipandang dari sisi penggunaan, PDRB merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang digunakan habis di suatu wilayah selama satu tahun. Dengan demikian dapat diformulasikan dalam model persamaan sebagai berikut;

$$Y = C + I + E - M$$

$$C = C_r + C_n + C_p$$

$$I = I_f + I_s$$

Dimana,

Y	= Produk Domestik Regional Bruto
C	= Konsumsi
C_r	= Konsumsi Rumah tangga
C_n	= Konsumsi Nirlaba
C_p	= Konsumsi Pemerintah
I	= Pembentukan Modal
I_f	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
I_s	= Perubahan inventori
E	= Ekspor
M	= Impor

1.2.2. Konsumsi Rumah tangga

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, konsumsi rumahtangga terdiri dari dua komponen yaitu untuk pengeluaran makanan dan bukan makanan. Sumber data yang digunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Metode penghitungan untuk konsumsi makanan digunakan adalah gabungan dari metode langsung dan penilaian harga eceran/harga yang dibayar oleh rumah tangga. Metode tersebut digunakan untuk memperkirakan konsumsi rumah tangga perkapita per jenis barang selama satu tahun. Data konsumsi yang dipakai adalah rata-rata konsumsi perkapita dalam kuantum selama seminggu. Untuk memperoleh selama satu tahun rata-rata konsumsi tersebut dikali dengan 52. Sedangkan untuk memperoleh perkiraan konsumsi pada tahun-tahun yang tidak dilaksanakan survei (susenas) dengan modul pengeluaran maka dilakukan perkiraan dengan cara menghitung elastisitas konsumsi perjenis barang.

Model regresi yang digunakan untuk memperkirakan koefisien elastisitas konsumsi perkapita tersebut adalah :

$$Q_i = aY_i^b$$

Dimana;

Q_i = Rata-rata Konsumsi dalam kuantum

Y_i = Rata-rata Pendapatan

a = Konstanta

b = Koefisien Elastisitas

i = Komoditas ke- i

Setelah itu, dihitung perkiraan konsumsi perkapita dengan rumus sebagai berikut;

$$C(n+1) = C_n + (b \times dp(n+1) \times C_n)$$

Dimana;

$C(n+1)$ = Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan tahun (n + 1)

C_n = Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan tahun dasar (n)

b = Koefisien Elastisitas

$dp(n+1)$ = Perubahan pendapatan perkapita harga konstan tahun ke n dan n+1

Metode penghitungan untuk memperkirakan konsumsi bukan makanan, caranya hampir sama dengan perkiraan konsumsi makanan. Bedanya hanya terdapat pada model regresinya, dimana pada konsumsi bukan makanan digunakan model regresi linier sederhana;

$$Q_i = a + bY_i$$

Dimana;

Q_i = Rata-rata Konsumsi perkapita sebulan (Rp.)

Y_i = Rata-rata Pendapatan perkapita sebulan

a = Konstanta

b = Koefisien Elastisitas

I = Komoditas ke- i

1.2.3. Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba

Nilai pengeluaran konsumsi LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan lembaga dalam rangka melakukan kegiatan layanan kepada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi (antara) ditambah biaya primer (upah dan gaji pegawai, penyusutan barang modal, dan pajak tak langsung). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika lembaga menggunakan input yang diperoleh secara cuma-cuma dari pihak lain, maka nilainya diperkirakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Perkiraan nilai pengeluaran konsumsi LNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung.

a. Metode Langsung

Metode penghitungan yang didasarkan pada data hasil survei atau sensus. Nilai tersebut merupakan hasil estimasi rata-rata biaya layanan dari sampel sebagai berikut :

$$\bar{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}}{n_i}$$

Dimana :

x_{ij} = nilai biaya layanan untuk lembaga ke j dari bentuk LNPRT kode-i

\bar{x}_i = rata-rata biaya layanan LNPRT kode-i

n_i = banyaknya sampel LNPRT kode-i

Jika rata-rata biaya layanan LNPRT per bentuk lembaga \bar{x}_i dikalikan dengan populasi bentuk LNPRT kode I (N_i), maka akan diperoleh estimasi nilai pengeluaran konsumsi bentuk LNPRT kode i (x_i) atau $x_i = \bar{x}_i \cdot N_i$

b. Metode tidak langsung

Metode ini memperkenalkan cara menghitung estimasi pendapatan LNPRT (sebagai sumber pembiayaan) berdasarkan pengeluaran dari lembaga lain yang membiayai kegiatan LNPRT. Dengan asumsi bahwa pada umumnya LNPRT tidak bertujuan mencari untung, maka total penerimaan sama dengan total pengeluaran.

1.2.4. Konsumsi Pemerintah

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan besarnya konsumsi pemerintah adalah; pengeluaran pemerintah pusat dan pertahanan, realisasi pengeluaran daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa, serta jumlah pegawai negeri pusat dan daerah.

Metode penghitungan dalam memperkirakan besarnya pengeluaran konsumsi pemerintah sama dengan total output dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pemerintahan.

Terdapat dua tahap penghitungan konsumsi pemerintahan sebagai berikut;

- ☞ Untuk pengeluaran konsumsi pemerintah pusat dan pertahanan keamanan di daerah dilakukan dengan cara alokasi (alokatornya adalah jumlah pegawai negeri).

☞ Untuk pengeluaran konsumsi pemerintah di daerah diperoleh dari pengeluaran kelompok rutin dan pembangunan. Cara penghitungannya dapat diformulasikan sebagai berikut;

$$K_p = G_p + 0,0575 G_b + B_r + 0,0913 B_p + P_r + P_d + S_{gp} - P_{bj}$$

Dimana ;

G_p = Belanja Pegawai dari belanja rutin

G_b = Belanja pegawai dari belanja pembangunan

B_r = Belanja barang dari belanja rutin

B_p = Belanja barang dari belanja pembangunan

P_r = Perbaikan ringan dan pemeliharaan rutin

P_d = Perjalanan dinas dsb

S_{gp} = Penyusutan dari belanja pegawai ($0,05G_b$)

P_{bj} = Penerimaan Barang dan jasa

1.2.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto dapat dibedakan atas :

- i. Pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi
- ii. Pembentukan modal dalam bentuk mesin dan peralatan.

Metode yang digunakan dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto adalah pendekatan arus barang. Untuk mengestimasi pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi diperoleh dengan menggunakan rasio sebesar 0,9157 dari output sektor konstruksi yang merupakan pembentukan modal. Sedangkan pembentukan modal dalam bentuk mesin dan peralatan diperoleh dengan cara ekstrapolasi.

1.2.6. Perubahan Inventori

Nilai perubahan inventori dalam komponen penggunaan PDRB masih merupakan selisih statistik. Perhitungan dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi dengan komponen permintaan akhir lainnya.

1.2.7. Ekspor dan Impor

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan ekspor dan impor bersumber dari Publikasi Statistik Ekspor dan Impor yang diterbitkan oleh BPS untuk perdagangan luar negeri, sedangkan perdagangan antar pulau/provinsi dari Publikasi Bongkar Muat Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai tukar rupiah terhadap US \$ baik nilai jual maupun beli diperoleh dari Laporan Perbankan Bank Indonesia Makassar.

Metode estimasi untuk komponen ekspor dan impor dilakukan dengan menghitung nilai ekspor dan impor barang dan jasa (masih dalam US\$), setelah nilai ekspor dan impor diperoleh maka dikonversi dengan nilai rupiah. Untuk ekspor menggunakan nilai rata-rata kurs beli, sedangkan impor menggunakan kurs jual.

BAB II

ULASAN SINGKAT

2.1. PDRB Menurut Penggunaan

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan baik atas dasar berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Selama periode 2009-2013, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku mencapai angka 184,78 triliun rupiah pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2009 sekitar 99,95 triliun rupiah. Ini berarti, selama lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 85 persen. Sedangkan atas dasar harga konstan, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi meningkat sebesar 36 persen dari 47,33 triliun rupiah pada tahun 2009 menjadi 64,28 triliun rupiah pada tahun 2013.

Dengan membandingkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan antar tahun, dapat terlihat besarnya perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun berjalan. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,61 persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu mencapai 8,37 persen, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2010 yang sebesar 8,19 persen.

Tabel 2.1
PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen, Distribusi
dan Pertumbuhan Riil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

Komponen	Nilai (Juta Rp)	Distribusi (%)	Pertumbuhan Riil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	87.168.536,67	47,17	6,68
2. Konsumsi Nirlaba	1.604.055,14	0,87	10,51
3. Konsumsi Pemerintah	61.510.949,67	33,29	5,06
4. PMTB	54.940.101,12	29,73	14,07
5. Perubahan Inventori	2.815.980,07	1,52	(33,28)
6. Ekspor	37.027.694,36	20,04	6,42
7. Impor	60.284.257,99	32,62	4,02

Sumber : BPS Prov Sulawesi Selatan

Pada tahun 2013, dengan total PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 184,78 triliun rupiah, hampir setengah dari PDRB atas dasar harga berlaku Sulawesi Selatan atau sekitar 47,17 persen digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 87,17 triliun rupiah dimana dari 47,17 persen tersebut sebanyak 30,78 persen digunakan untuk konsumsi makanan dan 16,40 persen digunakan untuk konsumsi non makanan. Besarnya porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut merupakan faktor pendorong utama besarnya permintaan barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi di Sulawesi Selatan. Selain konsumsi rumah tangga, komponen PDRB penggunaan lain yang tampak dominan adalah konsumsi pemerintah yakni sebesar 61,51 triliun rupiah atau 33,29 persen. Selanjutnya untuk impor barang dan jasa baik itu ke luar negeri maupun antar provinsi juga mempunyai andil yang cukup besar dalam PDRB menurut penggunaan Sulawesi Selatan yaitu mencapai 32,62 persen atau sebesar 60,28 triliun rupiah. Komponen PMTB dan ekspor barang dan jasa memiliki *share* yang juga tidak kecil yaitu masing-masing sebesar 29,73 persen dan 20,04 persen dengan nilai ADHB 54,94 triliun rupiah dan 37,03 triliun rupiah. Komponen perubahan inventori merupakan komponen yang *share*-nya paling sedikit di antara yang lainnya, yaitu hanya 1,52 persen atau 2,82 triliun rupiah.

2.2. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga merupakan upaya pemenuhan semua kebutuhan sehari-hari semua anggota rumah tangga baik kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk memenuhi kebutuhan ini melalui penghasilan yang diterima oleh penduduk. Komponen konsumsi rumah tangga termasuk juga kedalamnya adalah komponen konsumsi nirlaba. Konsumsi rumah tangga berfungsi sebagai pelaku konsumsi akhir, demikian juga lembaga pemerintah, merupakan pengguna barang dan jasa sebagai konsumsi akhir, baik yang berasal dari output domestik maupun impor.

Tabel 2.2
Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Menurut Komponen
Pembentuknya (Milyar Rupiah), 2011-2013

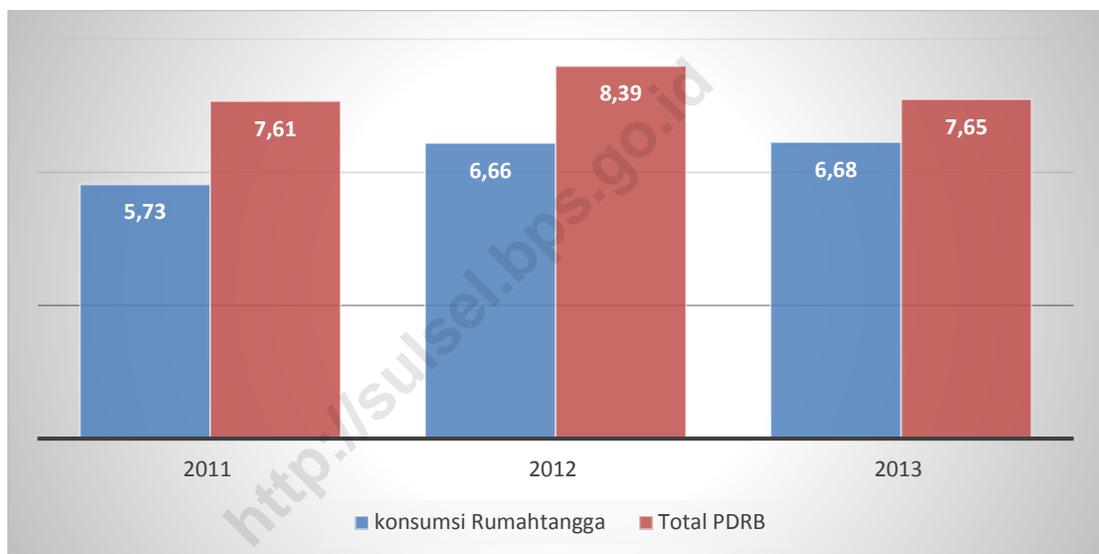
Uraian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
ADHB			
Konsumsi Rumah Tangga	66.264,06	75.278,70	87.168,54
Makanan	42.723,73	48.380,89	56.867,61
Non Makanan	23.540,33	26.897,81	30.300,92
Konsumsi Nirlaba	1.062,79	1.254,09	1.604,05
Total PDRB Sulawesi Selatan	137.519,77	159.859,93	184.783,06
ADHK 2000			
Konsumsi Rumah Tangga	28.969,12	30.898,48	32.962,30
Makanan	18.746,19	19.910,80	21.173,29
Non Makanan	10.222,93	10.987,68	11.789,01
Konsumsi Nirlaba	364,55	390,63	431,68
Total PDRB Sulawesi Selatan	55.093,74	59.718,50	64.284,43

Sumber : BPS Prov Sulawesi Selatan

Secara umum, PDRB Sulawesi Selatan bersumber dari konsumsi rumah tangga akan tetapi *share*-nya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 misalnya, tatanan ekonomi Sulawesi Selatan sebagian besar bersumber dari konsumsi rumah tangga sekitar 66.264 milyar rupiah atau sekitar 48,19 persen dengan *share* yang terus menurun hingga pada tahun 2013 *share*-nya hanya 47,17 persen atau sekitar 87.168 milyar rupiah .

Sedangkan atas dasar harga konstan 2000, konsumsi rumah tangga memiliki *share* yang tidak terlalu jauh berbeda dengan harga berlaku yaitu sebesar 52,58 persen dengan capaian sebesar 28.969,12 milyar rupiah pada tahun 2011. Jumlah ini mengalami penurunan hingga 51,28 persen pada tahun 2013 dengan angka sebesar 32.962,30 milyar rupiah.

Grafik 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan (Persen), 2011-2013



Sebagai komponen yang memiliki *share* tertinggi dalam PDRB menurut penggunaan Sulawesi Selatan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami fluktuasi mengikuti pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Seperti yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 8,39 persen, padahal tahun 2011 tumbuh hanya sebesar 7,61 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan dari 5,73 persen pada tahun 2011 menjadi 6,66 persen pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 perekonomian Sulawesi Selatan

tumbuh melambat 7,65 persen sedangkan komponen konsumsi rumah tangga tumbuh sedikit meningkat menjadi 6,68 persen.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Salah satu bentuk penggunaan akhir barang dan jasa adalah komponen konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah yang dimaksud di sini adalah konsumsi pemerintah yang murni untuk konsumsi akhir, dimana tidak termasuk konsumsi antara. Konsumsi pemerintah memiliki peran yang relatif penting dalam mendukung proses ekonomi.

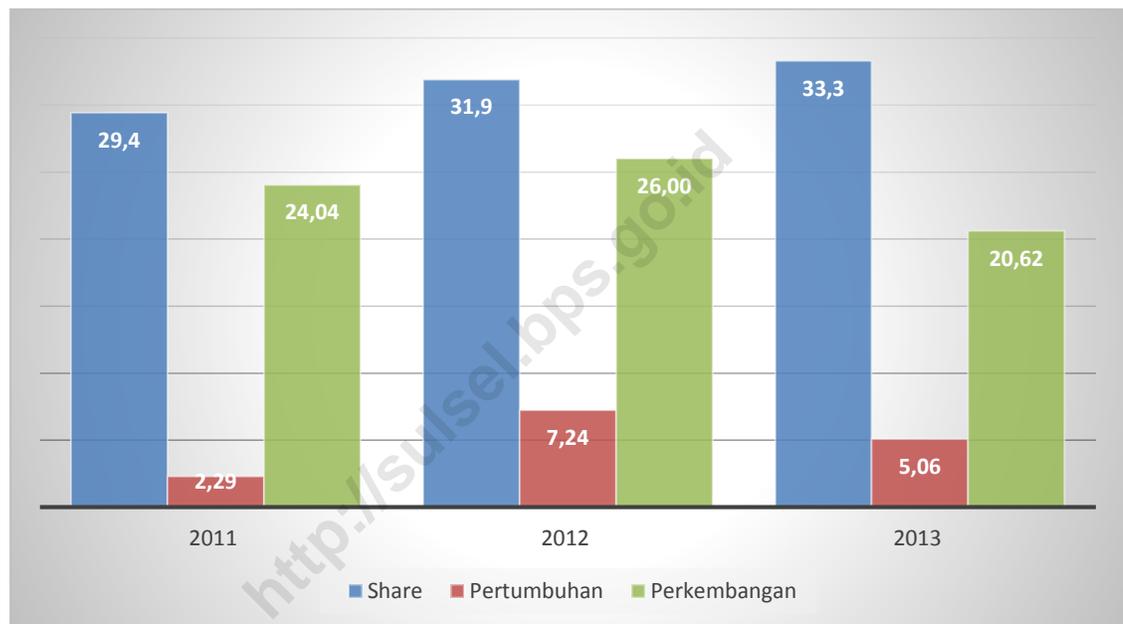
Meskipun konsumsi pemerintah memiliki peran dalam proses ekonomi, namun diharapkan agar pemerintah tetap memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah setempat diperlukan alokasi anggaran/dana yang tidak sedikit. Biaya yang dikeluarkan ini terdiri dari biaya untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran balas jasa pegawai dan penyusutan barang modal.

Akan tetapi penjumlahan dari semua belanja ini masih harus dikurangkan dengan hasil penjualan barang dan jasa pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan akumulasi dari pengeluaran pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Selama periode waktu 2011-2013, pengeluaran untuk konsumsi pemerintah mengalami pergerakan yang berfluktuatif dalam menciptakan struktur perekonomian Sulawesi Selatan dimana terjadi peningkatan *share*

setiap tahunnya, dari 29,43 persen (40.471 milyar rupiah) meningkat hingga tahun 2013 menjadi 33,29 persen (61.510 milyar rupiah). Jika dilihat perkembangan konsumsi pemerintah dari tahun 2011-2013 maka perkembangan relatif sama berkisar 20 persen.

Grafik 2.2
Perbandingan *Share*, Pertumbuhan dan Perkembangan Komponen Konsumsi Pemerintah di Sulawesi Selatan (Persen), 2011-2013



Sumber : BPS Prov Sulawesi Selatan

Pada kurun waktu 2011-2013, pengeluaran untuk konsumsi pemerintah mengalami peningkatan dalam menciptakan struktur perekonomian Sulawesi Selatan. Pada tahun 2011, *share* konsumsi pemerintah dalam PDRB Sulawesi Selatan sebesar 29,4 persen (sekitar 40.471 milyar rupiah). Jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 31,90 persen pada tahun 2012 dengan nilai 50.995 milyar rupiah. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2013 hingga menjadi 33,29 persen (sekitar 61.511 milyar rupiah). Jika dilihat perkembangan

konsumsi pemerintah dari tahun 2011-2013 maka perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 26,0 persen dan terendah pada tahun 2013 sebesar 20,6 persen..

Dari sisi harga konstan, konsumsi pemerintah juga mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2012, pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai kisaran 7,24 persen, lebih tinggi dari pada pertumbuhan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2013, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 5,06 persen dan mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.3
Perkembangan Konsumsi Pemerintah Menurut Komponen Pembentuknya
(Milyar Rupiah), 2011-2013

Uraian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
ADHB			
Konsumsi Pemerintah (Milyar Rupiah)	40 471,29	50 994,75	61.510,95
Penduduk (000 Jiwa)	8.156,10	8.250,00	8.342,00
Konsumsi Pemerintah Per Kapita (Juta Rupiah)	4,96	6,18	7,37
ADHK 2000			
Konsumsi Pemerintah (Milyar Rupiah)	7.637,38	8.190,443	8.605,17
Penduduk (000 jiwa)	8.156,10	8.250,00	8.342,00
Konsumsi Pemerintah Per Kapita (Rupiah)	0.94	0.99	1.03

Sumber : BPS Prov Sulawesi Selatan

Setiap pengeluaran pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas atau publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi dalam pembahasan ini belum menekankan pada manfaat yang diterima oleh tiap penduduk dalam artian umum. Hal ini disebabkan karena belum terpisahkan antara pengeluaran pemerintah yang dinikmati secara perorangan (individu) dan maupun secara bersama-sama (kolektif).

Pada tahun 2011 misalnya, rata-rata konsumsi pemerintah per kapita sebesar 4,96 juta rupiah, naik menjadi 6,18 juta rupiah pada tahun 2012 (naik sebesar 25 persen). Dan kondisi terakhir di 2013 sudah mencapai 7,37 juta rupiah.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Investasi fisik merupakan penjumlahan PMTB dan perubahan inventori, apabila perubahan inventori bertanda positif maka investasi fisik akan menjadi lebih besar. Sedangkan sebaliknya jika perubahan inventori bertanda negatif maka investasi fisik akan menjadi lebih kecil dari PMTB.

Pada kurun waktu 2011-2013 peranan investasi fisik dalam PDRB Sulawesi Selatan selalu di atas 20 persen. PMB (investasi fisik) pada tahun 2011 sebesar 34.883 milyar rupiah yang terdiri dari PMTB Sulawesi Selatan mencapai 32.503 milyar rupiah dan perubahan inventori sebesar 2.380 milyar rupiah. Kondisi ini juga terjadi ada tahun 2012 dan 2013 dimana investasi fisik

selalu lebih besar dari pada PMTB karena nilai perubahan inventori 3 tahun terakhir ini selalu bernilai positif sehingga menambah nilai PMTB dalam meningkatkan investasi fisik di Sulawesi Selatan.

Tabel 2.4
Perkembangan Investasi Fisik Menurut Komponen di Sulawesi Selatan
(Milyar Rupiah), 2011-2013

Uraian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
ADHB			
Investasi Fisik	34 883,49	47 012,46	57 756,08
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	32 503,00	44 038,58	54 940,10
Inventori	2 380,49	2 973,88	2 815,98
ADHK 2000			
Investasi Fisik	14 165,33	16 811,09	18 193,90
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	12 279,15	14 735,43	16 809,07
Inventori	1 886,18	2 075,66	1 384,83

Sumber : BPS Prov Sulawesi Selatan

Seiring dengan pergerakan perkembangan investasi fisik Sulawesi Selatan, pertumbuhan komponen investasi fisik juga mengalami pergerakan yang berfluktuatif dengan pertumbuhan tiap tahun yang cukup menggembarakan karena berada pada kisaran 8-25 persen jauh melampaui pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2012 dan 2013. Seperti

terlihat pada grafik 2.3, pada tahun 2011, pertumbuhan investasi fisik mencapai 25,55 persen sedangkan pertumbuhan PDRB hanya sekitar 7,61 persen. Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan investasi fisik mengalami sedikit perlambatan menjadi 18,68 persen tetapi dengan nilai pertumbuhan yang tetap berada di atas pertumbuhan PDRB sebesar 8,39 persen dan pada tahun 2013 pertumbuhan investasi fisik melambat cukup signifikan hanya sebesar 8,23 persen sedikit di atas pertumbuhan PDRB yang sebesar 7,65 persen.

Grafik 2.3
Perbandingan Pertumbuhan Investasi Fisik dan PDRB Sulawesi Selatan (Persen), 2011-2013



2.5. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Ekspor merupakan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan arus barang dan jasa keluar dari suatu wilayah. Sedangkan impor adalah kejadian yang sebaliknya, yaitu kegiatan ekonomi yang mengakibatkan arus barang dan jasa masuk ke suatu wilayah. Dalam hal ini baik ekspor maupun impor Provinsi

Sulawesi Selatan terbagi dua, yaitu yang berhubungan dengan negara asing disebut 'antar negara' dan yang berhubungan dengan provinsi lain di Indonesia disebut 'antar provinsi' yang kemungkinannya bisa melalui darat, laut, dan udara.

Tabel 4. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2013 (Milyar Rupiah)

Uraian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Ekspor	30.199	31.812	37.028
a. Antar Negara	17.320	16.429	17.848
b. Antar Provinsi	12.879	15.383	19.179
II. Impor	35.360	46.492	60.284
a. Antar Negara	13.012	13.868	18.875
b. Antar Provinsi	22.348	32.624	41.409
Surplus/Defisit	-5.161	-14.680	-23.256

Total nilai ekspor Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 30.199 milyar rupiah yang terdiri dari ekspor antar negara sebesar 17.320 milyar rupiah dan ekspor antar provinsi 12.879 milyar rupiah. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 31.812 dengan nilai ekspor antar negara sebesar 16.429 milyar rupiah dan ekspor antar provinsi 15.383 milyar rupiah

dan di tahun 2013 total ekspor Sulawesi Selatan terus meningkat mencapai 37.028 milyar rupiah dengan sumbangan terbesar berasal dari ekspor antar pulau sebesar 19.179 milyar rupiah sedikit di atas ekspor antar negara yang sebesar 17.848 milyar rupiah.

Seiring dengan peningkatan yang terjadi pada nilai ekspor Sulawesi Selatan, impor juga cenderung meningkat dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2011 nilai impor Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku sebesar 35.360 milyar rupiah yang terdiri dari impor antar negara 13.012 milyar rupiah dan impor antar provinsi 22.348 milyar rupiah. Sedangkan pada tahun 2012 impor Sulawesi Selatan mengalami peningkatan menjadi 46.492 milyar rupiah, dan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 60.284 milyar rupiah yang terdiri dari impor antar negara 18.875 milyar rupiah dan impor antar daerah sebesar 41.409 milyar rupiah.

Selain itu, dalam kurun waktu 2011-2013 nilai ekspor Sulawesi Selatan selalu lebih kecil dibanding nilai impornya sehingga neraca perdagangan Sulawesi Selatan mengalami defisit dalam tiga tahun terakhir ini.

LAMPIRAN TABEL-TABEL

<http://sulselibps.go.id>

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Juta Rp)

Komponen	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	52.780.918,53	59.573.780,13	66.264.062,13	75.278.704,01	87.168.536,67
1.1. Makanan	33.656.117,20	38.330.540,37	42.723.727,42	48.380.890,83	56.867.612,26
1.2. Non Makanan	19.124.801,34	21.243.239,76	23.540.334,71	26.897.813,18	30.300.924,41
2. Konsumsi Nirlaba	785.657,90	913.608,10	1.062.787,01	1.254.091,57	1.604.055,14
3. Konsumsi Pemerintah	21.779.659,32	32.627.339,98	40.471.286,02	50.994.749,26	61.510.949,67
4. Pembentukan Modal	22.274.612,09	27.581.958,11	32.502.998,34	44.038.574,78	54.940.101,12
5. Perubahan Stok	1.021.148,55	382.385,32	2.380.488,34	2.973.881,76	2.815.980,07
6. Ekspor Barang dan Jasa	28.582.418,22	36.426.092,70	30.198.742,66	31.812.532,88	37.027.694,36
6.1. Luar Negeri	13.518.786,84	22.658.150,34	17.320.013,47	16.429.211,66	17.848.234,21
6.2. Antar Daerah	15.063.631,38	13.767.942,36	12.878.729,19	15.383.321,23	19.179.460,15
8. Impor Barang dan Jasa	27.269.824,87	39.642.954,17	35.360.592,58	46.492.602,88	60.284.257,99
8.1. Luar Negeri	6.560.963,62	9.403.250,76	13.012.456,84	13.868.074,93	18.874.938,16
8.2. Antar Daerah	20.708.861,25	30.239.703,41	22.348.135,74	32.624.527,95	41.409.319,83
PDRB	99.954.589,75	117.862.210,18	137.519.771,93	159.859.931,38	184.783.059,05

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Juta Rp)

Komponen	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	25.877.600,45	27.399.813,00	28.969.123,09	30.898.485,35	32.962.301,27
1.1. Makanan	16.894.068,00	17.784.351,16	18.746.190,60	19.910.805,03	21.173.293,88
1.2. Non Makanan	8.983.532,45	9.615.461,84	10.222.932,49	10.987.680,33	11.789.007,39
2. Konsumsi Nirlaba	316.425,53	341.379,08	364.547,22	390.630,71	431.681,62
3. Konsumsi Pemerintah	7.087.109,15	7.466.196,27	7.637.384,80	8.190.443,60	8.605.171,77
4. Pembentukan Modal	9.783.914,13	11.142.660,77	12.279.149,53	14.735.426,71	16.809.073,16
5. Perubahan Stok	746.796,48	140.130,25	1.886.175,40	2.075.663,22	1.384.825,51
6. Ekspor Barang dan Jasa	15.656.044,85	23.535.446,18	22.651.057,52	21.894.584,92	23.300.877,16
6.1. Luar Negeri	7.910.685,94	15.604.790,15	14.961.854,52	13.555.777,82	14.621.331,22
6.2. Antar Daerah	7.745.358,91	7.930.656,03	7.689.203,00	8.338.807,10	8.679.545,94
8. Impor Barang dan Jasa	12.141.812,21	18.825.725,69	18.693.696,14	18.466.737,43	19.209.499,96
8.1. Luar Negeri	2.967.062,10	4.418.571,81	6.397.219,97	5.628.221,96	6.135.229,05
8.2. Antar Daerah	9.174.750,11	14.407.153,89	12.296.476,17	12.938.515,47	13.074.270,91
PDRB	47.326.078,38	51.199.899,85	55.093.741,42	59.718.497,08	64.284.430,52

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (%)

Komponen	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	52,80	50,55	48,19	47,09	47,17
1.1. Makanan	33,67	32,52	31,07	30,26	30,78
1.2. Non Makanan	19,13	18,02	17,12	16,83	16,40
2. Konsumsi Nirlaba	0,79	0,78	0,77	0,78	0,87
3. Konsumsi Pemerintah	21,79	27,68	29,43	31,90	33,29
4. Pembentukan Modal	22,28	23,40	23,64	27,55	29,73
5. Perubahan Stok	1,02	0,32	1,73	1,86	1,52
6. Ekspor Barang dan Jasa	28,60	30,91	21,96	19,90	20,04
6.1. Luar Negeri	13,52	19,22	12,59	10,28	9,66
6.2. Antar Daerah	15,07	11,68	9,37	9,62	10,38
8. Impor Barang dan Jasa	27,28	33,63	25,71	29,08	32,62
8.1. Luar Negeri	6,56	7,98	9,47	8,68	10,21
8.2. Antar Daerah	20,72	25,66	16,25	20,41	22,41
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (%)

Komponen	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	54,68	53,52	52,58	51,75	51,28
1.1. Makanan	35,70	34,74	34,03	33,35	32,94
1.2. Non Makanan	18,98	18,78	18,56	18,40	18,34
2. Konsumsi Nirlaba	0,67	0,67	0,66	0,65	0,67
3. Konsumsi Pemerintah	14,98	14,58	13,86	13,72	13,39
4. Pembentukan Modal	20,67	21,76	22,29	24,67	26,15
5. Perubahan Stok	1,58	0,27	3,42	3,48	2,15
6. Ekspor Barang dan Jasa	33,08	45,97	41,11	36,66	36,25
6.1. Luar Negeri	16,72	30,48	27,16	22,70	22,74
6.2. Antar Daerah	16,37	15,49	13,96	13,96	13,50
8. Impor Barang dan Jasa	25,66	36,77	33,93	30,92	29,88
8.1. Luar Negeri	6,27	8,63	11,61	9,42	9,54
8.2. Antar Daerah	19,39	28,14	22,32	21,50	20,34
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.1 Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (%)

Komponen	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	111,37	112,87	111,23	113,60	115,79
1.1. Makanan	111,03	113,89	111,46	113,24	117,54
1.2. Non Makanan	111,96	111,08	110,81	114,26	112,65
2. Konsumsi Nirlaba	137,91	116,29	116,33	118,00	127,91
3. Konsumsi Pemerintah	147,97	149,81	124,04	126,00	120,62
4. Pembentukan Modal	129,21	123,83	117,84	135,49	124,75
5. Perubahan Stok	78,94	37,45	622,54	124,93	94,69
6. Ekspor Barang dan Jasa	88,89	127,44	82,90	105,34	116,39
6.1. Luar Negeri	64,04	167,60	76,44	94,86	108,64
6.2. Antar Daerah	136,41	91,40	93,54	119,45	124,68
8. Impor Barang dan Jasa	96,62	145,37	89,20	131,48	129,66
8.1. Luar Negeri	80,98	143,32	138,38	106,58	136,10
8.2. Antar Daerah	102,91	146,02	73,90	145,25	126,93
PDRB	117,40	117,92	116,68	116,25	115,59

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.2 Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (%)

Komponen	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	106,30	105,88	105,73	106,66	106,68
1.1. Makanan	106,12	105,27	105,41	106,21	106,34
1.2. Non Makanan	106,63	107,03	106,32	107,48	107,29
2. Konsumsi Nirlaba	115,24	107,89	106,79	107,16	110,51
3. Konsumsi Pemerintah	105,13	105,35	102,29	107,24	105,06
4. Pembentukan Modal	116,28	113,89	110,20	120,00	114,07
5. Perubahan Stok	114,96	18,76	1.246,02	110,05	66,72
6. Ekspor Barang dan Jasa	87,34	150,33	96,24	96,66	106,42
6.1. Luar Negeri	72,48	197,26	95,88	90,60	107,86
6.2. Antar Daerah	110,47	102,39	96,96	108,45	104,09
8. Impor Barang dan Jasa	87,98	155,05	99,30	98,79	104,02
8.1. Luar Negeri	76,32	148,92	144,78	87,98	109,01
8.2. Antar Daerah	92,56	157,03	85,35	104,41	101,84
PDRB	106,23	108,19	107,61	108,39	107,65

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 4 Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (%)

Komponen	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	203,96	217,42	228,74	243,63	264,45
1.1. Makanan	199,22	215,53	227,91	242,99	268,58
1.2. Non Makanan	212,89	220,93	230,27	244,80	257,03
2. Konsumsi Nirlaba	248,29	267,62	291,54	321,04	371,58
3. Konsumsi Pemerintah	307,31	437,00	529,91	622,61	714,81
4. Pembentukan Modal	227,67	247,53	264,70	298,37	326,85
5. Perubahan Stok	136,74	272,88	126,21	143,27	203,35
6. Ekspor Barang dan Jasa	182,56	154,77	133,32	145,30	158,91
6.1. Luar Negeri	170,89	145,20	115,76	121,20	122,07
6.2. Antar Daerah	194,49	173,60	167,49	184,48	220,97
8. Impor Barang dan Jasa	224,59	210,58	189,16	251,76	313,83
8.1. Luar Negeri	221,13	212,81	203,41	246,40	307,65
8.2. Antar Daerah	225,72	209,89	181,74	254,11	316,72
PDRB	211,20	230,20	249,61	267,69	287,45

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (%)

Komponen	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,77	6,60	5,20	6,51	8,54
1.1. Makanan	4,63	8,19	5,74	6,62	10,53
1.2. Non Makanan	5,00	3,78	4,23	6,31	4,99
2. Konsumsi Nirlaba	19,67	7,79	8,94	10,12	15,74
3. Konsumsi Pemerintah	40,74	42,20	21,26	17,49	14,81
4. Pembentukan Modal	11,12	8,73	6,93	12,91	9,36
5. Perubahan Stok	-31,34	99,56	-53,75	13,52	41,93
6. Ekspor Barang dan Jasa	1,78	-15,22	-13,86	8,98	9,37
6.1. Luar Negeri	-11,64	-15,03	-20,27	4,70	0,72
6.2. Antar Daerah	23,49	-10,74	-3,52	10,14	19,78
8. Impor Barang dan Jasa	9,81	-6,24	-10,17	33,10	24,65
8.1. Luar Negeri	6,11	-3,76	-4,42	21,14	24,86
8.2. Antar Daerah	11,19	-7,01	-13,41	39,82	24,64
PDRB	10,51	8,99	8,43	7,24	7,38

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Penggunaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sjsel.brno.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125
Telp. (0411) 854838, Fax. (0411) 851225